

**OPTIMALISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DI KALURAHAN
BANJARASRI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

ANISA MAYA RAMADANI

NIT. 22314406

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

POLITEKNIK AGRARIA STPN

2026

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of community empowerment programs in developing tourism potential in Kalurahan Banjarasri, analyze the factors affecting their suboptimal implementation, and formulate optimization efforts. The study employed a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observation, and documentation. The informants included the village government, BUMDes, Pokdarwis, the Tourism Office, community leaders, and local residents. Data were analyzed interactively through data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings show that the community empowerment program in developing tourism potential in Kalurahan Banjarasri has been implemented, but it has not yet been implemented optimally or evenly across tourism locations. This condition is influenced by uneven community capacity and participation, weak governance and institutional arrangements, a lack of continuity in tourism management, and limited resource support. Optimization efforts need to focus on strengthening community capacity, improving institutional arrangements and stakeholder coordination, developing supporting facilities, and strengthening sustainable Community-Based Tourism practices.

Keywords: *Community Empowerment, Tourism Potential, Program Optimization, Community Participation, Kalurahan Banjarasri.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Kerangka Teoretis	12
2.2.1 Teori Pemberdayaan Masyarakat	12
2.2.2 Teori Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan.....	15
2.2.3 Teori Pengembangan Potensi Pariwisata Desa	17
2.2.4 Teori <i>Community-Based Tourism</i> (CBT) atau Pariwisata Berbasis Masyarakat.....	20
2.2.5 Teori Kelembagaan dan Kolaborasi Antarpemangku Kepentingan ...	23
2.2.6 Teori Optimalisasi Program Pemberdayaan Masyarakat	26
2.3 Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Format Penelitian	33
3.2. Lokasi Penelitian.....	34
3.3. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	36
3.3.1. Jenis dan Sumber Data	36
3.3.2. Teknik Pengumpulan Data	38
3.4. Subjek, Penetapan dan Jumlah Informan	40
3.5. Definisi Operasional Konsep atau Variabel	41

3.6.	Teknik Analisis Data	44
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		47
4.1.	Lokasi Geografis dan Batas Wilayah Kalurahan Banjarasri	47
4.2.	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	51
4.3.	Potensi Pariwisata Kalurahan Banjarasri	55
4.4.	Kelembagaan Terkait Pengembangan Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat	60
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		63
5.1.	Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kalurahan Banjarasri	63
5.2.	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Belum Optimalnya Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kalurahan Banjarasri	76
5.2.1.	Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat	76
5.2.2.	Tata Kelola dan Kelembagaan	79
5.2.3.	Pengelolaan dan Keberlanjutan Wisata	83
5.2.4.	Dukungan Sumber Daya dan Kondisi Lokasi	85
5.3.	Upaya Optimalisasi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kalurahan Banjarasri	89
5.3.1.	Penataan Kawasan Wisata dan Perbaikan Sarana Pendukung	90
5.3.2.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	92
5.3.3.	Memperjelas Arah Pengembangan dan Memperkuat Koordinasi Antaraktor	94
5.3.4.	Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Desa sebagai Pedoman Pengembangan	96
5.3.5.	Pengembangan Kegiatan Wisata yang Lebih Rutin dan Berpihak pada Manfaat Ekonomi Masyarakat	98
5.4.	Pembahasan	102
BAB VI PENUTUP		107
6.1.	Kesimpulan	107
6.2.	Saran	108
6.3.	Rekomendasi	109
DAFTAR PUSTAKA		110
LAMPIRAN		113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan penting dalam pembangunan desa karena menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan dipahami sebagai proses yang membuat masyarakat menjadi lebih berdaya, yaitu memiliki kemampuan untuk bertindak, berpartisipasi, dan mengembangkan berbagai aspek kehidupannya. Proses tersebut tidak berlangsung secara otomatis, tetapi memerlukan keterlibatan aktif masyarakat agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan (Margayaningsih, 2018).

Dalam konteks pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dalam tata kelola desa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa desa tidak hanya berfungsi sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai ruang pembangunan yang memberi tempat bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengelola potensi wilayahnya.

Salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa adalah sektor pariwisata. Kepariwisataan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi yang berorientasi pada kunjungan wisatawan, tetapi juga sebagai sarana untuk membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menekankan pembangunan kepariwisataan secara komprehensif dan berkelanjutan, termasuk pemberdayaan usaha masyarakat dan penguatan sumber daya manusia di sekitar destinasi wisata.

Pengembangan desa wisata pada dasarnya dapat menjadi sarana yang menghubungkan potensi lokal dengan pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan *Community-Based Tourism*, masyarakat lokal tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku penting dalam pengelolaan

dan pengembangan wisata. Dengan demikian, pariwisata berbasis masyarakat dapat menjadi instrumen penguatan ekonomi lokal apabila dikelola secara partisipatif, terarah, dan berkelanjutan (Rahayu dkk., 2017).

Meskipun demikian, keberadaan potensi wisata tidak secara otomatis menjamin bahwa pemberdayaan masyarakat akan berjalan optimal. Dalam praktiknya, berbagai program pemberdayaan masih menghadapi hambatan, baik dari sisi pelaksanaan, pendampingan, maupun pemahaman para pelaksana terhadap tujuan program itu sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya kegiatan, tetapi juga oleh kualitas proses, arah program, dan konsistensi pelaksanaannya di lapangan (Muslim, 2017).

Dalam konteks kelembagaan desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi instrumen penting dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal, termasuk sektor pariwisata. Keberadaan BUMDes memberi peluang bagi desa untuk mengelola usaha secara lebih terstruktur, memiliki arah pengembangan yang lebih jelas, serta membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak. Berdasarkan peraturan yang berlaku, posisi tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang mengatur pendirian, organisasi, modal, unit usaha, hingga pembinaan dan pengembangan BUMDes.

Pemilihan judul “Optimalisasi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kalurahan Banjarasri” dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara beragamnya potensi pariwisata yang dimiliki Kalurahan Banjarasri dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang masih memerlukan penguatan. Kalurahan Banjarasri memiliki potensi wisata alam, religi, budaya, dan ekonomi kreatif yang berpeluang dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh keterlibatan masyarakat yang merata, pengelolaan yang terkoordinasi, kelembagaan yang kuat, serta pelaksanaan kegiatan wisata yang konsisten dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan terletak pada ketiadaan potensi pariwisata, melainkan pada bagaimana program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan agar potensi yang tersedia dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal.

Penelitian ini penting dilakukan karena pengembangan pariwisata desa seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan destinasi dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas, partisipasi, kemandirian, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain itu, keberagaman potensi dan pola pengelolaan pada setiap lokasi wisata di Kalurahan Banjarasri memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya program, serta upaya perbaikan yang sesuai dengan kondisi setempat. Atas dasar permasalahan tersebut, peneliti memilih judul ini untuk merumuskan upaya optimalisasi program pemberdayaan masyarakat agar pengembangan potensi pariwisata di Kalurahan Banjarasri dapat dilaksanakan secara lebih partisipatif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Selain berkaitan dengan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan pengelolaan destinasi, pengembangan potensi pariwisata di Kalurahan Banjarasri juga berkaitan dengan aspek pertanahan. Pemanfaatan tanah sebagai lokasi destinasi wisata, akses jalan, dan pembangunan sarana pendukung memerlukan kejelasan mengenai dasar pemanfaatan tanah, kewenangan pengelolaan, serta kesepakatan antara pihak yang menguasai tanah dan pihak pengelola destinasi. Kejelasan aspek pertanahan penting untuk mendukung pembangunan fasilitas, memberikan kepastian dalam pengelolaan, mencegah potensi permasalahan antarpihak, serta menjaga keberlanjutan kegiatan pariwisata berbasis masyarakat.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, kajian mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata telah banyak dilakukan, terutama dari sisi strategi pengembangan, implementasi program, partisipasi masyarakat, dan faktor-faktor penghambatnya. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sekaligus merumuskan upaya optimalisasinya pada desa dengan potensi dan pola pengelolaan wisata yang beragam masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks desa yang memiliki berbagai potensi wisata, tetapi belum sepenuhnya dikelola melalui pola pemberdayaan masyarakat yang terpadu dan berkelanjutan.

Penelitian ini dibatasi pada program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata di Kalurahan Banjarasri. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan program, faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya pelaksanaan program, serta upaya optimalisasinya. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas seluruh aspek pembangunan desa secara umum, tetapi menitikberatkan pada partisipasi masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, koordinasi antarpihak, keberlanjutan program, serta aspek pertanahan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah dalam pengembangan potensi pariwisata. Aspek pertanahan dalam penelitian ini ditempatkan sebagai bagian pendukung tata kelola dan keberlanjutan pengembangan destinasi, bukan sebagai fokus utama penelitian. Pembatasan tersebut dilakukan agar penelitian lebih terarah, mendalam, dan sesuai dengan konteks pemberdayaan masyarakat desa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata di Kalurahan Banjarasri?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata di Kalurahan Banjarasri?
3. Bagaimana upaya optimalisasi program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata di Kalurahan Banjarasri?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata di Kalurahan Banjarasri.
2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata di Kalurahan Banjarasri.

3. Merumuskan upaya optimalisasi program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata di Kalurahan Banjarasri.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu sosial, khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat dan pariwisata berbasis masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata desa, terutama yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, peran kelembagaan lokal, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan keberlanjutan program. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik mengenai optimalisasi program pemberdayaan masyarakat di wilayah yang memiliki potensi wisata beragam, tetapi belum dikelola secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kalurahan Banjarasri, BUMDes, pengelola desa wisata, Pokdarwis, dan kelompok masyarakat dalam mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi program yang telah berjalan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya pelaksanaan program, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk memperkuat partisipasi masyarakat, memperjelas peran kelembagaan, dan meningkatkan keberlanjutan pengembangan pariwisata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan potensi pariwisata di Kalurahan Banjarasri secara lebih partisipatif, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai optimalisasi program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata di Kalurahan Banjarasri, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Banjarasri telah berjalan dan berkembang secara bertahap. Proses pemberdayaan bermula dari penguatan ekonomi lokal melalui Lembaga Keuangan Mikro, Perundes, dan BUMDes, kemudian diperluas ke bidang pariwisata sejak tahun 2021. Pelaksanaan program juga memperoleh dukungan dari Dinas Pariwisata melalui koordinasi, pembinaan, pelatihan, sertifikasi, dan pembangunan fasilitas pendukung. Meskipun demikian, tingkat pelaksanaan program pada setiap lokasi wisata belum merata. Bukit Doa Maria Watu Blencong telah memiliki kegiatan yang relatif rutin dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Dolan Deso dan Pertenunan Sancta Maria Boro telah memberikan manfaat kepada masyarakat yang terlibat langsung, sedangkan MBKD/Watu Keker dan Giri Sembung masih berada pada tahap pengembangan. Dengan demikian, program telah berjalan, tetapi keterlibatan masyarakat dan manfaat ekonominya masih lebih banyak dirasakan oleh kelompok yang berhubungan langsung dengan kegiatan wisata.
2. Belum optimalnya program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata dipengaruhi oleh empat faktor utama. Pertama, kapasitas dan partisipasi masyarakat belum merata, motor penggerak lokal masih terbatas, dan terdapat persoalan regenerasi pada beberapa kegiatan. Kedua, tata kelola dan kelembagaan belum sepenuhnya kuat karena koordinasi, komunikasi, pembagian peran, dan penyampaian informasi kepada masyarakat masih perlu diperbaiki. Perbedaan dasar penguasaan dan pemanfaatan tanah pada setiap lokasi wisata juga memerlukan kejelasan dokumen, batas lokasi, kewenangan pengelolaan, serta izin atau kesepakatan pemanfaatan. Ketiga, pengelolaan dan keberlanjutan kegiatan wisata belum sama pada setiap lokasi karena tidak semua destinasi aktif dan memiliki kegiatan rutin. Keempat,

dukungan sumber daya dan kondisi lokasi masih terbatas, meliputi modal, akses jalan, fasilitas pendukung, promosi, pembekalan masyarakat, regenerasi, dan perbedaan karakter setiap destinasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan menyebabkan pelaksanaan program belum memberikan hasil yang luas, merata, dan berkelanjutan.

3. Upaya optimalisasi program perlu dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan sesuai dengan kebutuhan setiap lokasi wisata. Upaya tersebut meliputi penataan kawasan dan perbaikan sarana pendukung, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat, kejelasan arah pengembangan dan koordinasi antaraktor, pemanfaatan dokumen perencanaan desa sebagai pedoman, serta pengembangan kegiatan wisata yang lebih rutin dan berpihak pada manfaat ekonomi masyarakat. Optimalisasi juga perlu didukung melalui inventarisasi dasar penguasaan dan pemanfaatan tanah, kejelasan kewenangan pengelolaan, batas lokasi, serta penguatan izin atau kesepakatan pada setiap destinasi. Dengan pelaksanaan upaya tersebut secara terpadu, program pemberdayaan masyarakat memiliki peluang untuk berkembang secara lebih terarah, tertib, partisipatif, mandiri, dan berkelanjutan.

6.2. Saran

1. Pemerintah Kalurahan Banjarasri bersama BUMDes, desa wisata, Pokdarwis, dan pengelola destinasi perlu memperkuat koordinasi, memperjelas pembagian peran, serta meningkatkan penyampaian informasi kepada masyarakat. Pemerintah kalurahan juga perlu memastikan kejelasan kewenangan dan dasar pemanfaatan tanah pada setiap lokasi wisata. Dalam pembangunan fasilitas pariwisata, pengelola perlu memperhatikan kesesuaian tata ruang dan karakter fisik wilayah, terutama pada lokasi yang berada di lereng Perbukitan Menoreh. Penataan kawasan perlu mempertimbangkan kemiringan lahan, kestabilan tanah, sistem drainase, daya dukung lingkungan, dan keselamatan, serta dikoordinasikan dengan instansi teknis yang berwenang. Pemerintah kalurahan juga perlu mempertimbangkan pendampingan konsultan atau tenaga ahli pariwisata untuk membantu menyusun arah pengembangan, penataan

kawasan, pengembangan paket wisata, penguatan kelembagaan, dan strategi pemasaran yang sesuai dengan potensi serta kondisi setiap lokasi.

2. Dinas Pariwisata, pemerintah kalurahan, BUMDes, dan pengelola wisata perlu melanjutkan pelatihan serta pendampingan masyarakat, memperkuat motor penggerak lokal, dan menyiapkan regenerasi pelaku wisata, terutama dengan melibatkan generasi muda. Regenerasi diperlukan agar pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan tanggung jawab dalam mengelola potensi pariwisata dapat diteruskan secara berkelanjutan dan tidak bergantung pada individu atau kelompok tertentu. Pelibatan generasi muda dapat dilakukan melalui pelatihan pemanduan, pengelolaan destinasi, promosi digital, pengembangan produk wisata, kuliner, kerajinan, dan kegiatan ekonomi kreatif. Pengembangan kegiatan wisata juga perlu dilakukan secara lebih rutin serta didukung oleh perbaikan akses, fasilitas, promosi, dan pengembangan usaha lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan oleh masyarakat.

6.3. Rekomendasi

1. Pengembangan pariwisata perlu dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan Kalurahan Banjarasri dengan prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kesiapan setiap lokasi wisata. Pelaksanaan program juga perlu dievaluasi secara berkala berdasarkan partisipasi masyarakat, keberlanjutan kegiatan, kondisi fasilitas, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan.
2. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengkaji dampak ekonomi program pemberdayaan masyarakat secara lebih terukur, efektivitas kelembagaan pengelola wisata, serta aspek penguasaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan dokumen resmi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah: Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1–16.
Link: <https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/18006>
DOI: <https://doi.org/10.22146/jkn.18006>
- Andrianto, R. H., & Damayanti, M. (2018). Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata, studi kasus: Desa Wisata Pentingsari, DIY. *Teknik PWK: Perencanaan Wilayah Kota*, 7(4), 242–250.
Link: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/22249>
DOI: <https://doi.org/10.14710/tpwk.2018.22249>
- Dewi, M. H. U., Fandeli, C., & Baiquni, M. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129–139.
Link: <https://journal.ugm.ac.id/kawistara/article/view/3976>
DOI: <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Frasawi, E. S. (2018). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Ambengan Kecamatan Sukasada. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 6(3).
Link: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPG/article/view/20704>
- Izmi, D. S., & Prathama, A. (2023). Pengembangan desa wisata berbasis BUMDes. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 329–336.
Link: <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8270>
DOI: <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8270>
- Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2017). Characteristics of qualitative descriptive studies: A systematic review. *Research in Nursing & Health*, 40(1), 23–42.
Link: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5225027/>
DOI: <https://doi.org/10.1002/nur.21768>
- Kumala, G. B. W. N., Raharjo, A. N., Musleh, M., & Lubis, L. (2024). Model kolaborasi stakeholders dalam pengembangan Desa Wisata Ketapanrame berbasis pentahelix. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 137–157.
Link: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/15366>
DOI: <https://doi.org/10.26618/kjap.v10i2.15366>
- Ma'arif, B., Syakdiah, S., & Anggraini, O. (2021). Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Dusun Plempoh, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. *Populika*, 7(1),

50–65.

Link:

<https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/populika/article/view/27>

DOI: <https://doi.org/10.37631/populika.v7i1.27>

Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). Collaborative governance dalam pengembangan desa wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 7–12.

Link: <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/7883>

DOI: <https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.7-12>

Margayaningsih, D. I. (2018). Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. *Publiciana*, 11(1), 72–88.

Link: <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/140>

DOI: <https://doi.org/10.36563/publiciana.v11i1.140>

Megawati, V., Setyawan, A., Hananto, H., Dewi, H. P., Benarkah, N., Pratono, A. H., & Juniati, N. (2022). Pemberdayaan masyarakat sebagai faktor pengungkit pengembangan desa wisata: Studi kasus pada Wisata Sawah Sumber Gempong. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 5(4), 569–580.

Link: <https://inobis.org/ojs/index.php/jurnal-inobis/article/view/251>

DOI: <https://doi.org/10.31842/journalinobis.v5i4.251>

Muslim, A. (2017). Analisis kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam membangun kemandirian masyarakat miskin: Studi kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 79–87.

Link: <https://digilib.uin-suka.ac.id/25482/>

DOI: <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v13i1.14524>

Rahayu, S., Dewi, U., & Fitriana, K. N. (2017). Pengembangan *community based tourism* sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 21(1).

Link: <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/13111>

DOI: <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.13111>

Sadat, A., Nastia, N., & Hastuti, H. (2021). Optimalisasi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi desa wisata di Kabupaten Buton Selatan. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 261–268.

Link: <https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/4095>

Buku

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Link: <https://edge.sagepub.com/creswellrd5e>

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
Link: <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ>

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
Link: <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/qualitative-research-evaluation-methods/book232962>

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif, dan konstruktif*. Alfabeta.
Link: <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=21562>

Peraturan Perundang-undangan (UUD/UU/PP/Permendesa)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama*.
Link: <https://peraturan.Bpk..go.id/Details/199689/permendesa-pdtt-no-3-tahun-2021>

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
Link: <https://peraturan.Bpk..go.id/Details/101646/uud-no-->

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*.
Link: <https://peraturan.Bpk..go.id/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009>

Republik Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
Link: <https://peraturan.Bpk..go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>

Republik Indonesia. (2014b). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
Link: <https://peraturan.Bpk..go.id/Details/5482/pp-no-43-tahun-2014>

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*.
Link: <https://peraturan.Bpk..go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*.
Link: <https://peraturan.Bpk..go.id/Details/334481/uu-no-18-tahun-2025>